

Pelibatan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Partisipatif pada Aplikasi Simpor sebagai Media Monitoring Pembangunan Fisik di Kabupaten Belitung Timur

Elva Yuriati ^{a,1,*}, Sakir ^{b,2}



^{a,b}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblangan, Tamantirto, Bantul, Indonesia

¹elvayuriati29@gmail.com*, ²mas.sakir@fisipol.umy.ac.id

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Mengirim :

Penelaahan:

Diterima :

Keywords

Keterlibatan;

Aplikasi Simpor;

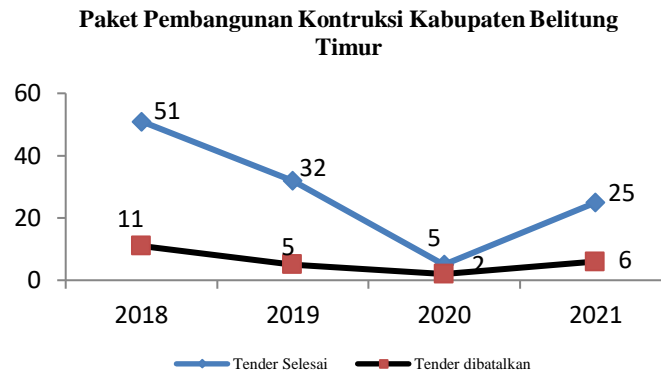
Pembangunan Partisipatif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (SIMPOR) di Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah lokal dalam hal ini adalah OPD dan pemerintah desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka yang mana hasil wawancara dianalisis menggunakan *software Nvivo 12Plus* melalui fitur *crosstab query*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penciptaan Aplikasi Simpor sebagai media monitoring pembangunan partisipatif di Kabupaten Belitung Timur sudah memenuhi dasar-dasar pengembangan digitalisasi pemerintahan; 2) keterlibatan pemerintah desa pada Aplikasi Simpor yaitu sebagai wakil masyarakat yang melakukan pemantauan dan pelaporan progress pembangunan khususnya dilakukan oleh admin simpor desa; 3) *leading sector* (Ekbang) sebagai pihak ketiga berperan sebagai verifikator yang menjembatani pemerintah desa dengan OPD; 4) tiap OPD menginput informasi terkait paket pembangunan dan tanggapan terkait monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa ke dalam aplikasi Simpor. Kesimpulannya adalah terdapat keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev* pembangunan fisik berupa monitoring dua arah yang terjadi dalam proses monitoring pada Aplikasi Simpor. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Aplikasi Simpor, yaitu: 1) pengembangan Aplikasi Simpor yang masih lambat; dan 2) SDM pelaksana yang masih terbatas. Saran bagi pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memperluas keterlibatan pada Aplikasi Simpor adalah diantaranya: 1) *leading sector*, dalam hal ini melalui pemerintah desa sebaiknya mulai memberikan edukasi ataupun pengenalan Aplikasi Simpor untuk masyarakat secara bertahap; 2) *leading sector* sebaiknya merekrut SDM khusus yang memiliki basic IT untuk mengembangkan Aplikasi Simpor supaya performa yang diberikan lebih maksimal; dan 3) *leading sector* sebaiknya menambah SDM operator yang bertugas dalam verifikasi.

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (SIMPOR) di Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah lokal dalam hal ini adalah OPD dan pemerintah desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan adanya ketimpangan data jumlah pengadaan paket pembangunan konstruksi/fisik di Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu empat tahun ke belakang yaitu tahun 2018-2021 yang mana selama kurun waktu tersebut jumlah pengadaan paket konstruksi/ fisik mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.



Sumber: (LPSE Kabupaten Belitung Timur, 2021)

Ketimpangan ini mengindikasikan penyerapan anggaran untuk pembangunan kontruksi/fisik di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting melakukan monitoring, pelaporan, dan evaluasi untuk meningkatkan kembali daya serap anggaran pada pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur, sehingga ketimpangan yang terjadi bisa diatasi. Dalam rangka membantu proses pengawasan tersebut agar lebih efektif, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan inovasi berupa sistem monitoring dan evaluasi pembangunan konstruksi/fisik elektronik (*e-monev*). *E-monev* memberikan beberapa urgensi dalam proses pengawasan pembangunan fisik. Sistem *e-monev* yang efektif akan berdampak baik bagi pertumbuhan pembangunan yang dibuktikan oleh meningkatnya hasil penilaian evaluasi SAKIP, tingkat capaian keberhasilan program pembangunan, persentase produk hukum yang diselesaikan, serta rata-rata penyerapan anggaran yang meningkat (Seyselis & Pradana, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur pedesaan, *e-monitoring* bisa memberikan informasi mulai dari informasi pencairan dana tahap 1, tahap 2, dan tahap 3; informasi laporan kegiatan kecamatan dan desa; hingga realisasi kerja dari target kerja yang telah ditentukan (Afriansyah et al., 2015). Selain dilakukan secara elektronik, pengawasan pembangunan fisik juga bisa dimudahkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga jalannya kegiatan pembangunan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta penilaian dari masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui penyimpangan dan permasalahan yang terjadi selama proses pembangunan (Hardianti et al., 2017). Dalam menjalankan pengawasan pembangunan kontruksi/fisik yang dilaksanakan di tiap desa, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimudahkan dengan sebuah inovasi berbasis aplikasi yang diberi nama Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (Simpor) (Perbup Belitung Timur No.26 Tahun 2021).

Aplikasi Simpor merupakan inovasi yang diciptakan khusus sebagai instrument pemantauan pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur dengan melibatkan masyarakat sebagai pemantau (Ahmad, 2021; Kabupaten Belitung Timur, 2021). Keterlibatan masyarakat pada Aplikasi Simpor saat ini masih diwakili oleh pemerintah desa, maka dari itu partisipasi yang terjadi berupa keterlibatan pemerintah desa dalam penggunaan Aplikasi Simpor. Aplikasi Simpor merupakan produk dari salah satu program Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yaitu Program Bangkit Berdaya Online (program perubahan sistem monitoring klasik menjadi monitoring online), yang mana ‘Bangkit Berdaya’ merupakan visi dari Kabupaten Belitung Timur itu sendiri (Kabupaten Belitung Timur, 2021). Hal itulah yang kemudian menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (SIMPOR) sebagai media *e-monev* di Kabupaten Belitung Timur, serta mengkaji apakah pembangunan partisipatif di Kabupaten Belitung Timur melalui *e-monev* mengalami peningkatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Hamdi et al., (2020), penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan sejumlah bukti empiris/ data lapangan yang mendeskripsikan kejadian-kejadian alamiah dan problematis dan juga makna dari kehidupan masing-masing tiap manusia. Penulis melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka (Sugiyono, 2015). Wawancara dilakukan kepada pencipta Aplikasi Simpor yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (Ekbang) Setda Kabupaten Belitung Timur; Kepala Subbagian Perencanaan Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur; serta 10 Admin Simpor Desa (Kurnia Jaya, Dukong, Simpang Pesak, Mayang, Gantung, Aik Kelik, Selinsing, Lalang, Bentaian Jaya, dan Dendang) yang masuk dalam daftar pengguna Aplikasi Simpor, yang mana penentuan narasumber menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian, yang diteliti adalah tentang keterlibatan pemerintah lokal (OPD dan pemerintah desa) dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor, yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber. Selain itu penelitian ini juga meneliti lebih lanjut terkait kematangan inovasi Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev* pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur. Pada proses pengumpulan data, pertama adalah melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui kematangan Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev* di Kabupaten Belitung Timur. Kedua adalah melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui keterlibatan pemerintah lokal (OPD dan pemerintah desa) dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor. Setelah data primer terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data sekunder berupa dokumen, laporan, peraturan-peraturan, visualisasi Aplikasi Simpor, penelitian terdahulu, serta artikel berita yang relevan. Hasil temuan dianalisis menggunakan interaktif model (Miles et al., 2014) yang mana perolehan data kemudian di reduksi, dipilih data yang benar-benar dibutuhkan. Data yang dipilih kemudian dianalisis menggunakan *software NVivo 12Plus* melalui fitur *crossstab query*. Hasil analisis *software Nivo 12Plus* disajikan dalam bentuk *crossstab analysis*, *project mapping*, tabel, dan gambar. Setelah semua data disajikan, ditarik kesimpulan dari hasil yang didapat yang mana tahap ini merupakan bagian akhir dari proses analisis data pada penelitian ini.

Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, yang menjadi bahan kajian yaitu pembangunan partisipatif oleh pemerintah lokal pada media *e-monev* pembangunan fisik di Kabuapten Belitung Timur. *E-monev* merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (PEPP) (Seyselis & Pradana, 2021). Dalam rangka menciptakan aplikasi pemantauan dan evaluasi secara elektronik, tidak lepas dari indikator-indikator pengembangan konsep digitalisasi pemerintahan, yang mana indikator tersebut diuraikan sebagai berikut: 1) *Support*, berupa dukungan dari pejabat publik setempat yang mana indikator ini merupakan indikator paling penting supaya konsep digitalisasi pemerintahan bisa diterapkan; 2) *Capacity*, berupa sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan digitalisasi pemerintahan untuk mewujudkan konsep yang sudah diciptakan; 3) *Value*, berupa manfaat yang didapatkan oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan (Indrajit, 2002).

Sedangkan pembangunan partisipatif adalah sistem pengelolaan pembangunan yang melibatkan rakyat secara langsung maupun tidak langsung dan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek melainkan sekaligus sebagai subyek pembangunan (Maripah, 2017). Pada dasarnya, terdapat 3 prinsip dalam pembangunan partisipatif, yaitu: 1) Melibatkan warga masyarakat dalam dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban; 2) Setiap pengambilan keputusan kebijakan diketahui, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat; serta 3) Setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga baik secara administrasi, manajerial, dan sosial (Timur, 2020). Maka dari itu, dalam mengkaji variabel pembangunan partisipatif, penulis menggunakan 3 indikator pengukuran yang terdiri dari keterlibatan, kemudahan akses, dan akuntabilitas.

Sistem *e-monev* memudahkan proses pengawasan dalam pembangunan dan membantu pegawai pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya, salah satunya monitoring terhadap belanja daerah (Ramadhani & Nasrah, 2019; Romdon, 2020) yang mana dibuktikan dengan hasil penilaian evaluasi SAKIP, tingkat capaian keberhasilan program pembangunan, persentase produk hukum yang diselesaikan, serta rata-rata penyerapan anggaran yang meningkat (Seyselis & Pradana, 2021). Adapun kesuksesan implementasi *e-monev* tidak lepas dari beberapa hal yang menjadi pendorong dari proses implementasi tersebut sehingga implementasi yang sukses akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terkontrol, dan akuntabel (Asri & Widianto, 2019; Basri et al., 2020; Toidin et al., 2017). Melengkapi penelitian sebelumnya, sistem monitoring secara elektronik juga bisa memproses hasil monitoring pencairan dana, laporan kegiatan kecamatan dan desa, realisasi dari target kerja yang ditentukan, serta informasi pencairan dana tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 (Afriansyah et al., 2015). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sangat berperan penting dalam memberikan penilaian untuk bahan evaluasi pembangunan (Hardianti et al., 2017).

Salah satu penelitian sebelumnya yaitu terkait peranan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif, menjelaskan bahwa pemerintah lokal (dalam hal ini kepala desa) yang ada di Desa Bukit Pedusunan Kabupaten Kuatan Singingi (Prananda, 2019) dinilai cukup berperan dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di daerahnya. Tidak hanya itu, kewenangan kepala desa juga memberikan efektifitas pada pelaksanaan pembangunan secara partisipatif pada Desa Baholang Kabupaten Pulau Taliabu (Amane, 2017). Keterlibatan lainnya yang dibentuk dalam pembangunan partisipatif adalah peranan yang diberikan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), mereka berperan dalam membantu pemerintah desa melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pelestarian, serta evaluasi pembangunan desa yang mana sekaligus menggerakkan masyarakat dalam partisipasi pembangunan (Irfan et al., 2020). Tidak hanya pemerintah lokal dan lembaga masyarakat saja,

masyarakat sendiri juga memberikan peranan dalam pembangunan partisipatif. Seperti yang terjadi di Desa Pendingin Kabupaten Kutai Kartanegara, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan oleh adanya kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana jalan, sumbangan swadaya berbentuk tenaga dan materi, serta adanya dukungan dan kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Putra, 2019). Berbeda halnya dengan pembangunan partisipatif yang terjadi di Kota Tangerang Selatan melalui Program Tangsel Youth Planner, program ini berperan penting dalam mewadahi partisipasi masyarakat lokal dengan adanya akomodir keterlibatan masyarakat yang menekankan pada aspek pembangunan fisik di Kota Tangerang Selatan (Novian & Machdum, 2020). Lain pula dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur, yang mana dalam pembangunan fisik di Desa Telaga terdapat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyampaikan agenda program rencana pembangunan serta memobilisasi partisipasi masyarakat di Desa Tealaga (Fratama, 2021).

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik beberapa penelitian sebelumnya terkait keterlibatan pada pembangunan partisipatif menggunakan Vosviewer, kepadatan kajian yang terdapat dalam *google scholar* digambarkan sebagai berikut.

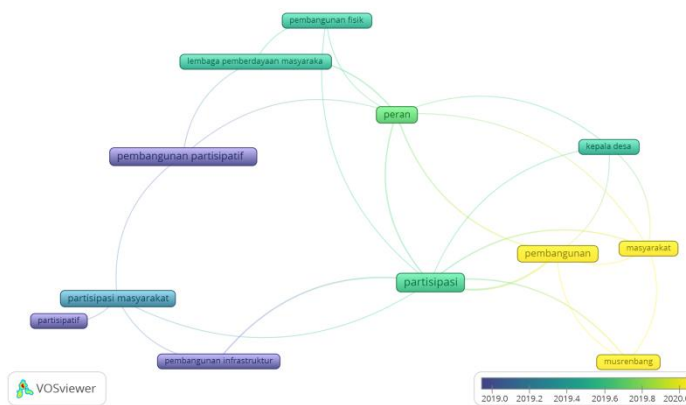


Figure 1. Kepadatan kajian dalam Google Scholar

Sumber: VOS Viewer version 1.6.18

Kepadatan kajian beberapa penelitian terdahulu terkait keterlibatan dalam pembangunan partisipatif pada *google scholar* terdiri dari 3 cluster kajian. Berikut ini uraian pengelompokkan kajian sebelumnya yang terdapat dalam *google scholar*.

Tabel 1. Klasifikasi kajian dalam Google Scholar

Cluster 1	- <u>Kepala Desa</u>
	- Masyarakat
	- Musrenbang
	- Partisipasi
	- Pembangunan
Cluster 2	- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
	- <u>Pembangunan Fisik</u>
	- <u>Pembangunan Partisipatif</u>
Cluster 3	- Peran
	- Partisipasi Masyarakat
	- Partisipatif

Berdasarkan 3 cluster hasil analisis bibliometrik beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa topik yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Topik penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pembangunan partisipatif, kepala desa, pembangunan fisik, dan pembangunan infrastruktur. Dari beberapa topik kajian di atas, sudah ada yang membahas tentang keterlibatan pemerintah lokal (dalam hal ini kepala desa). Akan tetapi, konteksnya masih dalam *cluster* partisipasi, pembangunan, dan musrenbang. Dalam konteks pembangunan partisipatif dan pembangunan fisik, hanya terdapat keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini kemudian memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif pada aplikasi monitoring pembangunan fisik. Maka dari itu, penelitian ini menjadi pembaharuan dalam kajian keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini terlebih dahulu mengenalkan Aplikasi Simpor sebagai media monitoring pembangunan fisik partisipatif di Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan tentang keterlibatan pemerintah lokal (OPD dan pemerintah desa) dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev* pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan 3 indikator penilaian. Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, kemudian diikuti solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev*.

a. Aplikasi Simpor sebagai Media Monitoring Pembangunan Fisik Partisipatif di Kabupaten Belitung Timur

Aplikasi Simpor merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* di Kabupaten Belitung Timur. Aplikasi Simpor diciptakan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan konstruksi/ fisik, yang mana partisipasi masyarakat dalam hal ini diwakili oleh pemerintah desa. Dalam pengembangannya, Aplikasi Simpor memiliki indikator-indikator yang harus diperhatikan sebagai bentuk digitalisasi pemerintahan. Indikator yang dimaksud terdiri dari dukungan pejabat setempat (*support*), kesiapan sumber daya (*capacity*), dan manfaat yang diperoleh (*value*) (Indrajit, 2002). Kemunculan Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev*, berdasarkan temuan yang kemudian dianalisis menggunakan *software* Nvivo 12Plus menunjukkan hasil sebagai berikut:

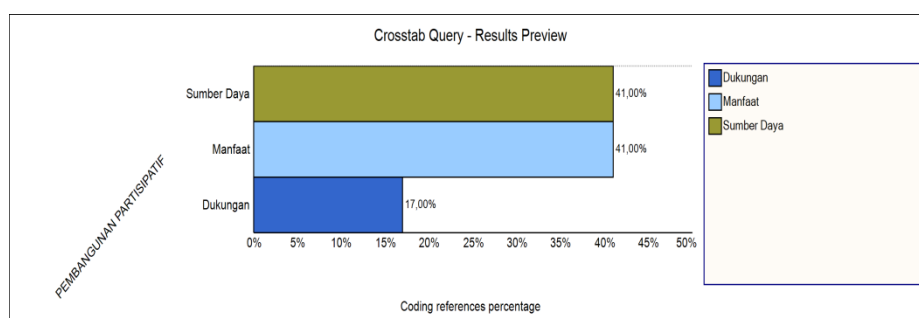


Figure 2. Analisis Indikator *E-Monev* pada Aplikasi Simpor

Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Berdasarkan *crosstab analysist*, indikator *e-monev* pada Aplikasi Simpor terkait pembangunan partisipatif memiliki dua indikator yang dominan. Indikator tersebut adalah sumber daya dan manfaat yang mana keduanya masing-masing sebesar 41%. Sedangkan satu indikator lainnya, yaitu dukungan, hanya memiliki intensitas sebesar 17%. Pada indikator sumber daya, terdapat 3 ukuran yang digunakan untuk menilai kesiapan sumber daya Aplikasi Simpor, yaitu: 1) biaya yang dibutuhkan; 2) dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi; dan 3) kebutuhan *skill* yang harus dimiliki pengguna. Temuan yang didapat menunjukkan bahwa tidak ada biaya khusus yang digunakan dalam penciptaan Aplikasi Simpor. Hal ini dikarenakan penciptaan Aplikasi Simpor merupakan salah satu syarat untuk mengikuti diklat PKP (Pengawasan Kepemimpinan) yang tidak memungut biaya apapun. Selanjutnya, untuk menjalankan Aplikasi Simpor, pengguna bisa menggunakan *handphone* melalui alamat *simpor.beltim.go.id* dikarenakan aplikasi ini belum bisa diakses secara *mobile* untuk didownload melalui *playstore*. Dalam menggunakan Aplikasi Simpor, pengguna hanya memerlukan kecakapan dalam menggunakan *handphone*, khususnya kemampuan mengambil foto yang mana akan diperlukan untuk melakukan monitoring.

Dalam rangka pemenuhan sumber daya untuk Aplikasi Simpor, terdapat 2 kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yaitu:

- a) Pengembangan Aplikasi Simpor yang masih lambat. Menu yang dimuat dalam Aplikasi Simpor masih sangat sederhana. Meskipun demikian, untuk melaksanakan pengembangan itu, terlebih dahulu harus menunggu kesiapan dari Diskominfo Kabupaten Belitung timur untuk menambah fitur dari Aplikasi Simpor.
- b) SDM pelaksana yang masih terbatas. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya SDM yang melakukan verifikasi di *Leading sector* Ekbang, yang mana hanya dilakukan oleh 1 orang saja.

Kendala yang dijelaskan berkaitan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki pemerintah dalam penggunaan Aplikasi Simpor. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat SDM merupakan salah satu ukuran untuk menilai kesiapan pengembangan *e-government*, tidak terkecuali dalam digitalisasi sistem monitoring pembangunan (*e-monev*) (Warinda, 2019). Untuk merawat dan mengembangkan *e-government*, paling tidak dibutuhkan empat jenis SDM bidang IT yang terdiri dari: *system analyst*, *senior programmer*, *junior programmer*, dan *operator* (Mariah, 2017). Kurangnya kapasitas SDM dengan empat kriteria di atas, membuat Kabupaten Belitung Timur memiliki kendala dalam pengembangan Aplikasi Simpor dan verifikasi di *leading sector*. Tidak hanya kapasitas SDM, pemerintah juga harus memperhatikan beberapa faktor lingkungan untuk mencapai efisiensi dari pengembangan *e-government* (Nam et al., 2022). Oleh karena itu, dalam pemenuhan efisiensi digitalisasi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memerlukan usaha lebih supaya implementasi Aplikasi Simpor bisa maksimal dan mampu berkembang sebagaimana mestinya.

Selanjutnya temuan tentang indikator manfaat yang diberikan oleh Aplikasi Simpor menunjukkan hasil analisis sebesar 41%. Memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang manfaat dari sistem *e-monev*, yang mana *e-monev* memberikan beberapa manfaat diantaranya (Ramadhani & Nasrah, 2019; Romdon, 2020): 1) Memudahkan pegawai pemerintah dalam *controlling*, pengawasan, dan evaluasi anggaran belanja daerah secara nyata pada tiap OPD; 2) Memberikan *fast and good service* kepada masyarakat sebagai penyedia barang/jasa; serta 3) Dapat memberikan informasi yang diinginkan. Dalam penggunaannya, Aplikasi Simpor memberikan beberapa manfaat nyata bagi

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan temuan yang ada, terdapat beberapa manfaat yang dirasakan dalam perspektif pemerintah dengan adanya Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev*, yaitu: a) Aplikasi Simpor sebagai media penyampaian informasi; b) Aplikasi Simpor bisa melakukan monitoring secara dua arah (korelasi antara OPD dengan pemerintah desa serta keterlibatan langsung kepala daerah dalam aplikasi); dan c) Aplikasi Simpor menjadikan proses monitoring menjadi lebih mudah dan efisien.

Jika melihat perbandingan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini, keduanya sama-sama menjelaskan bahwa *e-monev* memberikan manfaat sebagai media penyampai informasi dan memudahkan proses monitoring pemerintah. Hanya saja, pada Aplikasi Simpor terdapat manfaat tambahan yakni Aplikasi Simpor memfasilitasi monitoring pembangunan secara dua arah dan juga keterlibatan langsung kepala daerah di dalam aplikasi. Hal ini membuktikan bahwa Aplikasi Simpor memberikan manfaat baru sebagai media *e-monev* bagi pemerintahan dalam menjalankan monitoring pembangunan. Sehingga sistem monitoring dan evaluasi yang diciptakan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, membangun budaya kinerja pemerintahan, mendukung pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, memperbaiki pengelolaan anggaran guna memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaksana pembangunan (Düinkel, 2018; Warinda, 2019).

Berbeda dari dua indikator yang sudah dijelaskan, intensitas dukungan pada Aplikasi Simpor hanya sebesar 17%. Dukungan ini berupa ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur No. 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Pengendalian dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah sebagai penjamin keberlangsungan penggunaan aplikasi ini. Tidak hanya mendapatkan dukungan dari sisi regulasi, Aplikasi Simpor juga mendapat dukungan dari sisi psikologi dan sisi pemanfaatan output dari Aplikasi Simpor ini sendiri. Dukungan lainnya yang diberikan adalah dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa keikutsertaan OPD dalam penginputan data dan informasi ke dalam Aplikasi Simpor.

Dalam penelitian ini, juga ditampilkan perbandingan intensitas masing-masing indikator dari narasumber.

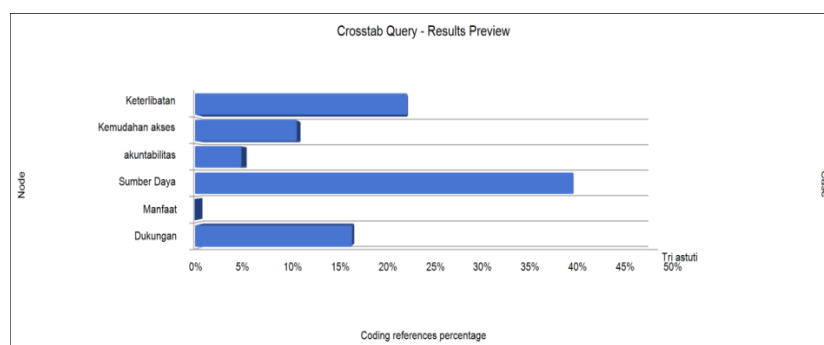


Figure 3. Analisis Wawancara Narasumber (1)

Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Grafik di atas menunjukkan hasil analisis wawancara dengan narasumber, yang mana hasil wawancara tersebut meliputi keterkaitan yang diteliti, yaitu antara Aplikasi Simpor dengan pembangunan partisipatif. Berdasarkan hasil analisis di atas, intensitas terbesar dalam wawancara adalah sumber daya

yang mana menghampiri angka 40%. Selanjutnya disusul oleh keterlibatan dengan intensitas lebih dari 20%. Kemudian dukungan lebih dari 15%, kemudahan akses sebesar 10%, akuntabilitas 5%, dan paling sedikit yaitu intensitas dari manfaat yaitu kurang dari 5%. Indikator sumber daya menempati jumlah terbesar dalam temuan penelitian ini dikarenakan dalam indikator sumber daya terdapat 3 kriteria sumber daya yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk pengembangan *e-government*. Hal ini berdampak pada temuan yang didapatkan, sumber daya lebih mendominasi jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Maka dari itu, hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa indikator sumber daya memiliki intensitas paling besar dalam kajian ini. Berbeda pula dengan indikator manfaat yang memiliki intensitas paling kecil dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan Aplikasi Simpor belum diakses masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, temuan yang didapat tentang manfaat Aplikasi Simpor, hanya melihat dari perspektif pemerintah saja.

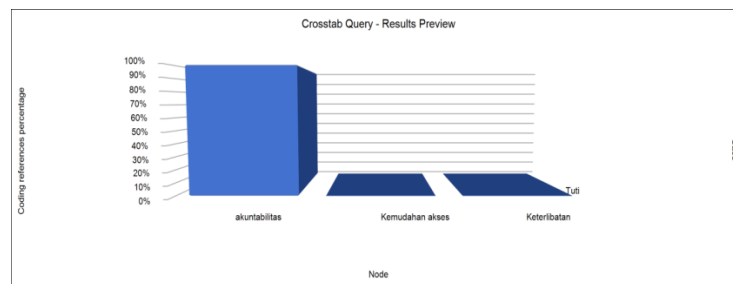


Figure 4. Analisis Wawancara Narasumber (2)

Sumber: Data Primer (Nvivo 12 Plus)

Selanjutnya, grafik di atas juga menunjukkan hasil analisis wawancara dengan narasumber. Akan tetapi, hasil wawancara di atas hanya meliputi kajian pembangunan partisipatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa, akuntabilitas memiliki intensitas yang hampir menyeluruh yaitu mencapai 100%. Akibat dari hal ini, dua indikator lainnya yaitu kemudahan akses dan keterlibatan memiliki intensitas yang sangat rendah, bahkan tidak ada. Hal ini akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. Melihat perbandingan analisis wawancara di atas, meskipun terdapat perbandingan intensitas tetapi kajian yang diteliti menuju pada arah yang sama, yaitu pembangunan partisipatif. Maka dari itu, bisa dilihat keterkaitan antara *e-monev* (Aplikasi Simpor) dan pembangunan partisipatif.

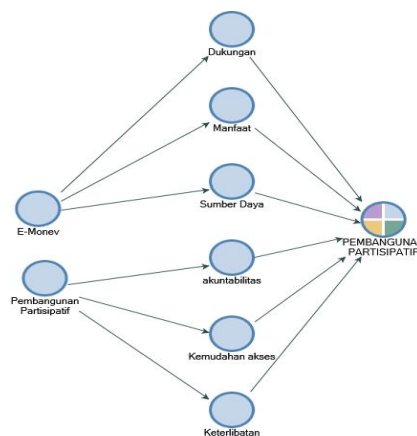


Figure 5. Project Mapping

Sumber: Nvivo 12Plus

Project map di atas menunjukkan bahwa Aplikasi Simpor sebagai *e-monev* yang melibatkan partisipasi menuju pada satu tujuan, yaitu pembangunan partisipatif. Hal ini sesuai dengan rancangan manfaat dari Aplikasi Simpor yang dimuat dalam “Laporan Aksi Perubahan: Peningkatan Kualitas Pencatatan Dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Sebagai Bahan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Melalui Program “Bb Online” Dan Aplikasi Simpor”, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Manfaat Aksi Perubahan Aplikasi Simpor

Manfaat	Deskripsi
Reformasi Birokrasi	Memaksimalkan sumber daya di Subbagian Administrasi Pembangunan, guna memaksimalkan fungsinya.
Perbaikan Kinerja	Meningkatkan pencatatan dan tindak lanjut hasil monitoring untuk bahan kebijakan pimpinan.
Kualitas Pelayanan Publik	Secara tidak langsung memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur melalui pemerintah desa.

Sumber: Data Sekunder (Haliza, 2021)

b. Pembangunan Partisipatif oleh Pemerintah Lokal melalui Aplikasi Simpor di Kabupaten Belitung Timur

Partisipasi dalam pengawasan pembangunan merupakan suatu kepentingan untuk mencapai stabilitas pemerintahan. Partisipasi mendorong pemikiran kritis tentang lingkungan sekitar yang nantinya digunakan dalam inisiatif pembangunan sehingga terjadi peningkatan pada efektivitas dan efisiensi biaya program pembangunan (Mohan, 2014; Reeves, 2015). Pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor menghasilkan temuan terkait indikator yang diteliti. Temuan di lapangan menunjukkan hasil sebagai berikut:

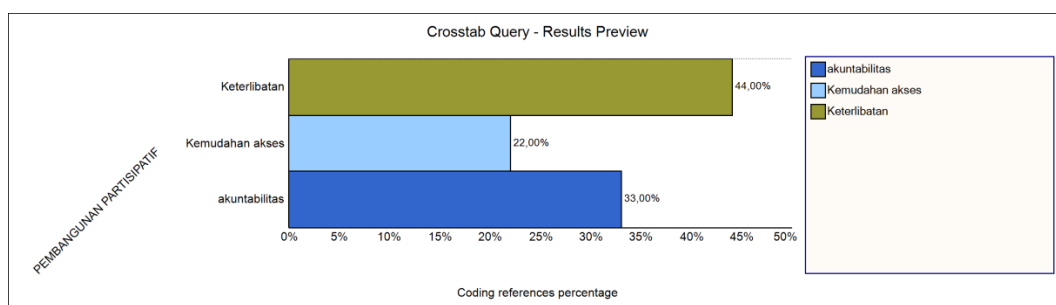


Figure 6. Analisis Indikator Pembangunan Partisipatif

Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator yang dominan terkait variabel pembangunan partisipatif adalah keterlibatan dengan intensitas 44%. Intensitas tertinggi kedua yaitu akuntabilitas 33%. Terakhir intensitas kemudahan akses sebesar 22%. Faktanya, Aplikasi Simpor melibatkan partisipasi dari beberapa *stakeholders* yang terdiri dari *Leading sector* yaitu Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (Ekbang) Setda Kabupaten Belitung Timur; Pemerintah Desa; OPD; dan Kepala

Daerah. Dalam hal ini, tiap desa melaksanakan monitoring mewakili masyarakat sebagai Admin Simpor sekaligus agen pembangunan yang akan menyampaikan bagaimana penyampaian informasi melalui Aplikasi Simpor untuk melakukan monitoring pembangunan. Adapun data dan informasi yang dimaksud mencakup pelaksanaan pekerjaan, nomor kontrak, tanggal kontrak, nama penyedia, realisasi keuangan, serta tanggapan-tanggapan terhadap hasil monitoring dari pemerintah desa maupun dari pihak Ekbang sendiri. Tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dibuatkan akun Aplikasi Simpor untuk pelaporan data dan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini daftar jumlah pengguna Aplikasi Simpor dari masing-masing OPD.

Tabel 3. Daftar jumlah pengguna Aplikasi Simpor

User	Jumlah Akun
Kepala Daerah & Wakil	2
Leading Sector (Ekbang)	1
OPD	49
Pemerintah Desa	39
Total	91

Sumber: Data Sekunder (Data diolah penulis)

Dikarenakan belum adanya akses langsung dari masyarakat pada aplikasi Simpor dan masyarakat masih diwakili pemerintah desa, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari pemerintah desa untuk mengetahui keterlibatan yang terjadi dalam penggunaan Aplikasi Simpor sebagai media monitoring pembangunan partisipatif. Narasumber yang dimaksud adalah admin Simpor dari beberapa desa yang masuk dalam daftar pengguna Aplikasi Simpor. Hasil wawancara dengan admin Simpor beberapa desa di Kabupaten Belitung Timur, ditampilkan dalam *crosstab analysyst* adalah sebagai berikut.

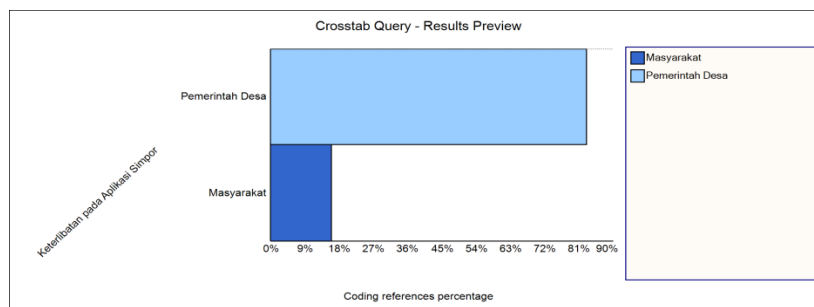


Figure 7. Analisis Partisipasi pada Aplikasi Simpor

Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Grafik di atas menunjukkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Kurnia Jaya, Desa Simpang Pesak, Desa Dukong, Desa Mayang, Desa Gantung, Desa Aik Kelik, Desa Selinsing, Desa Lalang, Desa Bentaian Jaya, dan Desa Dendang. Hasil analisis wawancara melalui *crosstab analysyst* Nvivo 12Plus di atas menunjukkan intensitas masing-masing keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam monitoring pembangunan melalui Aplikasi Simpor. Berdasarkan grafik di atas, keterlibatan yang mendominasi dalam monitoring pembangunan melalui Aplikasi Simpor adalah keterlibatan pemerintah desa yaitu >80%. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam monitoring melalui Aplikasi Simpor hanya ≤18%. Intensitas keduanya memiliki perbandingan yang sangat besar. Untuk meningkatkan

pembangunan partisipatif, pemerintah desa harus mampu berperan sebagai dinamisator, katalisator, serta pelopor pembangunan guna memperoleh partisipasi dari masyarakat (Putri, 2022). Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kepala desa dinilai cukup berperan dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di daerahnya sehingga memberikan efektifitas pada pelaksanaan pembangunan (Amane, 2017; Prananda, 2019). Keterlibatan pemerintah desa pada Aplikasi Simpor adalah pemerintah desa (Admin Simpor) terjun langsung untuk melakukan monitoring/pengawasan pembangunan yang ada di desa, mengambil foto kegiatan, dan mengisi laporan pemantauan di Aplikasi Simpor. Pemerintah desa memantau progress pembangunan mulai dari 0% hingga 100% dan laporan disampaikan setiap awal bulan maksimal tanggal 5. Dalam penyampaian laporan monitoring, juga diikuti dokumentasi progress pembangunan yang berjalan. Berikut ini salah satu contoh laporan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa di kabupaten Belitung Timur.

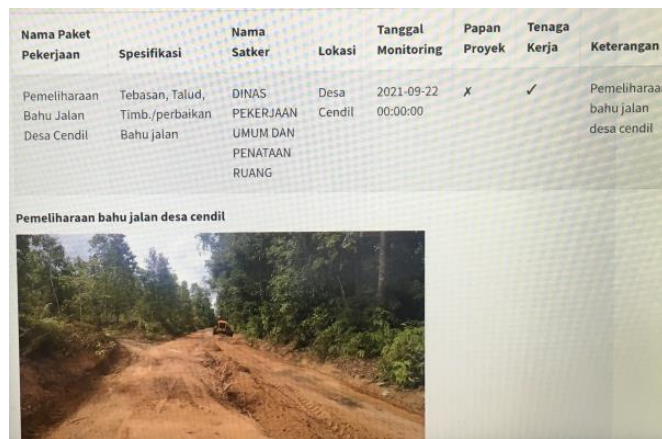


Figure 8. Tampilan Laman Monitoring Desa pada Aplikasi Simpor

Sumber: Data Sekunder (Aplikasi Simpor)

Berbeda dengan keterlibatan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat pada Aplikasi Simpor masih sangat minim. Dari 10 desa yang diwawancarai, hanya Desa Mayang dan Desa Gantung yang masyarakatnya sudah memberikan partisipasi dalam memberikan laporan kepada pemerintah desa terkait progress pembangunan untuk disampaikan dalam Aplikasi Simpor. Pada Desa Mayang, tepatnya tahun 2021 yang lalu terdapat proyek pembangunan jalan tani. Dalam hal ini masyarakat (khususnya kelompok tani) sudah dilibatkan dalam proses pengawasan progress pembangunan, dan mereka juga memberikan laporan hasil pengawasan kepada admin Simpor untuk dijadikan bahan laporan monitoring di Aplikasi Simpor. Seperti halnya di Desa Mayang, masyarakat di Desa Gantung sudah menunjukkan partisipasinya dalam implementasi Aplikasi Simpor. Masyarakat menyampaikan laporan kepada desa, kemudian operator (admin) melakukan pengecekan setiap bulan proses pembangunan untuk dilaporkan dalam Aplikasi Simpor. Adapun partisipasi lainnya yang bisa diberikan masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan oleh kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana jalan, sumbangan swadaya berbentuk tenaga dan materi, serta adanya dukungan dan kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Putra, 2019). Selain itu, terdapat kesukarelaan partisipasi masyarakat berupa pengumpulan data, pelaporan, pendampingan an verifikasi manfaat, serta umpan balik keberhasilan proyek (Kabonga, 2020). Minimnya partisipasi masyarakat yang ada dikarenakan Aplikasi Simpor terbilang baru dan saat ini masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, maka dari itu aplikasi

ini belum dikenalkan secara umum kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya informasi tentang peluang partisipasi (Chouinard & Cousins, 2013; Jekabsone, 2019).

Beralih dari partisipasi masyarakat, adapula partisipasi lain yang dibentuk dalam monitoring pembangunan melalui Aplikasi Simpor berupa koordinasi antara OPD, *Leading Sector* (Ekbang), dan pemerintah desa dalam melakukan monitoring pembangunan secara 2 arah. Selain itu, partisipasi yang dibentuk berupa keterlibatan kepala daerah dalam memantau langsung perkembangan pembangunan dalam Aplikasi Simpor. Koordinasi antar SKPD ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan partisipatif (Abadi et al., 2014). Akanbang & Abdallah, (2021) juga menyatakan bahwa staff inti pemerintahan (*stakeholders*) merupakan aktor utama yang terlibat dalam pemantauan, yang mana *stakeholders* memiliki akses informasi untuk menilai ketercapaian tujuan suatu proyek pembangunan (Gxabuza & Nzewi, 2021). Dalam melaksanakan monitoring pembangunan, laporan monitoring dari pemerintah desa bisa ditanggapi oleh OPD dengan melibatkan *Leading Sector* (Ekbang) yang membantu proses verifikasi sehingga terjadilah proses monitoring dua arah yang merupakan salah satu manfaat dari Aplikasi Simpor. Korelasi para pemangku kepentingan kemudian dijadikan bentuk peningkatan kapasitas monitoring evaluasi partisipatif yang berpengaruh pada keberlanjutan suatu proyek pembangunan (Rogito et al., 2020). Hal inilah yang menjadi kelebihan dari Aplikasi Simpor bahwa OPD bisa memberikan tanggapan atas hasil monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berikut ini gambaran proses monitoring dua arah pada Aplikasi Simpor.

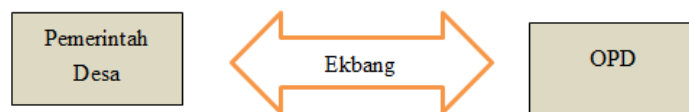


Figure 9. Monitoring 2 arah pada Aplikasi Simpor

Sumber: Data diolah penulis

Aplikasi Simpor juga memiliki kekurangan, yakni masyarakat masih belum terlibat secara langsung dalam penggunaan aplikasi. Aplikasi Simpor belum disebarluaskan secara umum ke masyarakat, sehingga akses yang ada masih terbatas. Pada dasarnya terdapat empat macam partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya adalah partisipasi dalam evaluasi. Jenis partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruh, dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan serta untuk melihat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan (Lukman, 2017). Dalam kasus Aplikasi Simpor, partisipasi yang ada berupa koordinasi antara pemerintah desa, OPD, dan *Leading Sector* secara dua arah dalam melakukan monitoring pembangunan. Pada penelitian terdahulu, terdapat keterlibatan lainnya yang dibentuk dalam pembangunan partisipatif yaitu peranan yang diberikan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) (Irfan et al., 2020). Mereka berperan dalam membantu pemerintah desa melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pelestarian, serta evaluasi pembangunan desa yang mana sekaligus menggerakkan masyarakat dalam partisipasi pembangunan (Irfan et al., 2020). Hal ini dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur yang menjelaskan bahwa terdapat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan fisik berupa penyampaian agenda program rencana pembangunan serta mobilisasi partisipasi masyarakat di Desa Telaga (Fratama, 2021).

Akuntabilitas informasi yang disampaikan, akses pada Aplikasi Simpor masing-masing *stakeholders* memiliki tampilan *dashboard* menu yang berbeda-beda. Untuk *leading sector* (Ekbang) menu yang terdapat pada *dashboard* terdiri dari menu paket pekerjaan (terdiri dari submenu Sirup) dan menu monitoring (paket monitoring; evaluasi monitoring). Selanjutnya, *dashboard* OPD yang terdiri dari menu paket pekerjaan dan menu monitoring. Pemerintah desa, *dashboard* yang ditampilkan terdiri dari menu Untuk bupati hanya tersedia satu menu yaitu menu monitoring yang terdiri dari submenu laporan monitoring. Akuntabilitas laporan monitoring dan evaluasi partisipatif membantu identifikasi kemunculan masalah, sehingga informasi yang diberikan membantu pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan dengan tepat (Kananura et al., 2017). Supaya dimensi pembangunan partisipatif berkembang, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah reformasi struktur kekuasaan (Arko, 2019) demi tercapainya akuntabilitas pelaporan dalam monitoring pembangunan. Pada masing-masing submenu Aplikasi Simpor, terdapat beberapa informasi yang ditampilkan untuk melakukan monitoring pembangunan, yang mana perinciannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rincian informasi pada Aplikasi Simpor

Submenu	Informasi yang Ditampilkan
SIRUP (database paket pembangunan; tampilan pada <i>dashboard leading sector</i>)	- Tahun anggaran
	- Tanggal SIRUP
	- Jenis APBD
	- Status Simpor
Paket monitoring	- Action
	- ID RUP
	- Nama paket pekerjaan
	- Spesifikasi
	- Jumlah pagu (Rp.)
	- Realisasi keuangan (Rp.)
	- Sisa pagu (Rp.)
	- Kode satuan kerja
	- Nama satuan kerja
	- Lokasi
Detail paket	- Jumlah paket
	- Tanggal awal pekerjaan SIRUP
	- Tanggal akhir pekerjaan SIRUP
	- Nama pejabat pembuat komitmen
	- NIP pejabat pembuat komitmen
	- Volume
	- Nnama perusahaan
	- Nama direktur
	- Alamat kantor
	- NPWP
Detail monitoring	- Nomor kontrak
	- Tanggal kontrak
	- Nilai kontrak
	- Masa pelaksanaan
	- Tanggal monitoring
	- Papan proyek
	- Tenaga kerja
	- Foto
	- Keterangan
	- Indikasi permasalahan
- % realisasi fisik	
- % realisasi keuangan.	
Tanggapan/ saran	Kolom untuk menyampaikan tanggapan/ saran.

Sumber: Data Sekunder (Aplikasi Simpor)

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bentuk perkembangan otonomi harus mampu menciptakan akuntabilitas untuk mewujudkan pembangunan partisipatif. Menurut Prianto, (2018) terdapat 5 dimensi akuntabilitas yang harus diciptakan dalam perkembangan otonomi, yaitu: *policy accountability*; pelaksanaan anggaran sudah benar; kepastian terhadap hukum; nilai efisiensi; dan akuntability proses. Informasi pada submenu SIRUP mewaliki dimensi *policy accountability* dan dimensi kepastian terhadap hukum. Informasi pada submenu paket monitoring mewakili dimensi pelaksanaan anggaran sudah benar, yang mana pada dimensi ini ditampilkan secara detail informasi tentang ID RUP; nama paket pekerjaan; spesifikasi; jumlah pagu (Rp.); realisasi keuangan (Rp.); sisa pagu (Rp.); kode satuan kerja; nama satuan kerja; lokasi; hingga jumlah paket. Informasi pada submenu detail monitoring mewakili dimensi nilai efisiensi dan akuntability proses. Dimensi nilai efisiensi ditunjukkan oleh informasi tentang persentase realisasi fisik dan persentase realisasi keuangan. Sedangkan dimensi akuntability proses ditunjukkan oleh informasi tentang papan proyek; tenaga kerja; foto; keterangan; serta indikasi permasalahan. Berdasarkan perincian informasi yang sudah ditampilkan, Aplikasi Simpor sudah memenuhi kelima dimensi akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan (media *e-monev*) untuk mewujudkan pembangunan partisipatif.

Selanjutnya, untuk mengakses Aplikasi Simpor dikategorikan cukup mudah. Dalam menjalankannya pengguna hanya memerlukan Hp atau laptop/PC. Kemudian lakukan langkah-langkah berikut untuk mulai menjalankan Aplikasi Simpor.

- a) Buka *web browser* yang ada di Hp atau Laptop/PC.
- b) Ketikkan alamat *simpor.beltim.go.id* pada kolom search atau alamat *website*.
- c) Setelah halaman login muncul, masukkan *username* dan *password*. Setelah itu Aplikasi Simpor siap dijalankan.

Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, didapat hasil yaitu: 1) penciptaan Aplikasi Simpor sebagai media monitoring pembangunan partisipatif di Kabupaten Belitung Timur sudah memenuhi dasar-dasar pengembangan digitalisasi pemerintahan; 2) keterlibatan pemerintah desa pada Aplikasi Simpor yaitu sebagai wakil masyarakat yang melakukan pemantauan dan pelaporan progress pembangunan khususnya dilakukan oleh admin simpor desa; 3) *leading sector* (Ekbang) sebagai pihak ketiga berperan sebagai verifikator yang menjembatani pemerintah desa dengan OPD; 4) tiap OPD menginput informasi terkait paket pembangunan dan tanggapan terkait monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa ke dalam aplikasi Simpor. Maka dari itu, ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor sebagai media *e-monev* pembangunan fisik berupa monitoring dua arah yang terjadi dalam proses monitoring pada Aplikasi Simpor. Dalam pengembangan Aplikasi Simpor, juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu: 1) pengembangan Aplikasi Simpor yang masih lambat; dan 2) SDM pelaksana yang masih terbatas. Adapun saran bagi pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memperluas keterlibatan pada Aplikasi Simpor adalah diantaranya: 1) *leading sector*, dalam hal ini melalui pemerintah desa sebaiknya mulai memberikan edukasi ataupun pengenalan Aplikasi Simpor untuk masyarakat secara bertahap; 2) *leading sector* sebaiknya merekrut SDM khusus yang memiliki *basic IT* untuk mengembangkan Aplikasi Simpor supaya performa yang diberikan lebih maksimal; dan 3) *leading sector* sebaiknya menambah SDM operator yang bertugas dalam verifikasi.

Acknowledgement

Terima kasih kepada Mr. Sakir Ridho Wijaya, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan saran dan arahan dalam penulisan hingga publikasi tulisan ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Astuti Ramadhani Haliza, S.E. salah satu narasumber yang telah memberikan banyak bantuan sehingga tulisan ini bisa diselesaikan.

References

- Abadi, T. W., Prajarto, N., & Guntoro, B. (2014). Performance E-Government Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kawistara*, 4(3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.6379>
- Afriansyah, A., Abdillah, L. A., & Andryani, R. (2015). *E-Monitoring Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muba*. 7–12.
- Ahmad, B. (2021). *Pemkab Beltim Luncurkan Program BBO dan SIMPOR*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/1091987/pemkab-beltim-luncurkan-program-bbo-dan-simpor?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign
- Akanbang, B. A. A., & Abdallah, A. I. (2021). Participatory Monitoring and Evaluation in Local Government: A Case Study of Lambussie District, Ghana. *Commonwealth Journal of Local Governance*, 25, 40–55. <https://doi.org/10.5130/cjlg.vi25.8037>
- Al-Hamdi, R., Sakir, Suswanta, Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Q. Ns (Ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Amane, A. P. O. (2017). Efektivitas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengkoordinasian Pembangunan Partisipatif di Desa Baholang Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu. *Jurnal Ilmiah Clean Governmnet*, 1(1), 31–44.
- Arko, B. (2019). Understanding Power Asymmetry in Participatory Development Spaces: Insights from Ghana's Decent Work Programme. *Regional Studies, Regional Science*, 6(1), 399–404. <https://doi.org/10.1080/21681376.2019.1638298>
- Asri, T. A., & Widiyanto, A. (2019). Faktor Sukses Implementasi E-Government Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(2), 169–180. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5191>
- Basri, A. C. L., Mursalim, & Ahmad, H. (2020). Penerapan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (E-Mpa) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 45–53.
- Chouinard, J. A., & Cousins, J. B. (2013). Participatory Evaluation for Development: Examining Research-based Knowledge from Within the African Context. *African Evaluation Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.4102/aej.v1i1.43>
- Düinkel, F. (2018). Electronic Monitoring in Europe – a Panacea for Reforming Criminal Sanctions Systems? A Critical Review. *Kriminologijos Studijos*, 6, 58–77. <https://doi.org/10.15388/crimlithuan.2018.6.3>

- Fratama, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 59(11), 61–74.
- Gxabuza, F., & Nzewi, O. (2021). Findings on the role of cooperatives in local economic development in Buffalo City Metropolitan Municipality: A participatory monitoring and evaluation approach. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 9(1). <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v9i1.387>
- Haliza, T. A. R. (2021). *Laporan Aksi Perubahan: Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring sebagai Bahan Pengendalian Pembangunan Melalui Program "BB Online" dan Aplikasi Simpor*.
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampara Kota). *E Jurnal Katalogis*, 5(1), 120–126.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi.
- Irfan, M., Hannan, S., & Massyat, M. (2020). Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. *Journal Peguruang: Conference Series*, 2(2), 76–81.
- Jekabsone, I. (2019). Participatory Process in Public Organisations for Regional Development: The Case of Latvia. *Public Policy and Administration*, 18(3), 85–94. <https://doi.org/10.5755/J01.PPAA.18.3.24719>
- Kabonga, I. (2020). The Contribution of Volunteerism to Monitoring and Evaluation of NGO Projects in Chegutu District, Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1752590>
- Kabupaten Belitung Timur. (2021). *Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Sebagai Bahan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Melalui Program "BB Online" dan Aplikasi SIMPOR (Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif)*. https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/49003
- Kananura, R. M., Ekirapa-Kiracho, E., Paina, L., Bumba, A., Mulekwa, G., Nakiganda-Busiku, D., Oo, H. N. L., Kiwanuka, S. N., George, A., & Peters, D. H. (2017). Participatory Monitoring and Evaluation Approaches that Influence Decision-making: Lessons from A Maternal and Newborn Study in Eastern Uganda. *Health Research Policy and Systems*, 15(Suppl 2). <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0274-9>
- LPSE Kabupaten Belitung Timur. (2021). <https://lpse.belitungtimurkab.go.id/eproc4/lelang?kategoriId=2&tahun=2021&instansiId=D41&rekanan=>
- Lukman, H. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43–53.
- Mariah, E. (2017). *SDM Data Center Handal Wujudkan E-Government*. Pemerintah Kabupaten Pasuruan. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-3633-sdm-data-center-handal-wujudkan-e-government-.html>
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Rpjmdes) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jom FISIP*, 4(2), 7.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mohan, G. (2014). Participatory Development. In V. Desai & R. B. Potter (Eds.), *The Companion to Development Studies* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.5860/choice.51-2973>
- Nam, H., Nam, T., Oh, M., & Choi, S. (2022). An Efficiency Measurement of E-Government Performance for Network Readiness: Non-Parametric Frontier Approach. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1). <https://doi.org/10.3390/joitmc8010010>
- Novian, M. N., & Machdum, S. V. (2020). Pembangunan Partisipatif Di Kota Tangerang Selatan Melalui Program Tangsel Youth Planner. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 173–181. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18690>
- Perbup Belitung Timur No.26 Tahun 2021, Pub. L. No. Perbup Belitung Timur No. 26 Tahun 2021 (2021).
- Prananda, J. (2019). *Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Prianto, A. (2018). Penguatan Partisipasi Didalam Akuntabilitas Pembangunan Desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 53–63. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2268>
- Putra, O. F. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan Di Desa Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Ilmu Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 81–92. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/Jurnal \(07-30-19-07-52-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/Jurnal (07-30-19-07-52-03).pdf)
- Putri, I. I. R. (2022). *Pemdes Diminta Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6001294/pemdes-diminta-tingkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan>
- Ramadhani, Y., & Nasrah. (2019). Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. *Jisti*, 2(2), 42–51. <https://ojs.stmik.ypls.ac.id/index.php/jisti/article/view/38>
- Reeves, L. S. (2015). Visualizing Participatory Development Communication in Social Change Processes: Challenging the Notion that Visual Research Methods are Inherently Participatory. *International Journal of Communication*, 9, 3327–3346. <http://ijoc.org>.
- Rogito, O., Maitho, T., & Nderitu, A. (2020). Capacity Building in Participatory Monitoring and Evaluation on Sustainability of Food Security Irrigation Projects. *Journal of Engineering, Project, and Production Management*, 10(2), 94–102. <https://doi.org/10.2478/jeppm-2020-0012>
- Romdon, I. (Universitas I. K. (2020). Electronic Disbursement Information System (Sipecel) and Monitoring Evaluation (E-Monev) In Order To Create Transparency of Public Service In Blitar Regency. *Revitalisasi : Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 242–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v9i2.1368>
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *Publika*, 9(1), 37–48. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p37-48>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Timur, P. K. T. (2020). Apa Itu Pembangunan Partisipatif. In *Website Resmi Nagari Kutai Taji Timur*. Nagari Kutai Taji Timur. <https://kuraitajitmur.padangpariamankab.go.id/index.php/artikel/2020/1/15/apa-itu-pembangunan-partisipatif>

Toidin, Sasongko, & Sutomo. (2017). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi E-Monev (Studi di KPU Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 3(1), 1–12. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/661>

Warinda, E. (2019). Evaluating Operationalisation of Integrated Monitoring and Evaluation System in Kisumu County: Implications for Policy Makers. *African Evaluation Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.4102/aej.v7i1.385>